

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
				<input checked="" type="checkbox"/>									

Empat Saksi Mangkir dalam Sidang Korupsi Lamsel

HANYA lima saksi yang hadir dari sembilan orang diagendakan memberikan keterangannya dalam sidang korupsi Pemkab Lampung Selatan Jilid II di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu, 14 April 2021.

Kelima saksi ini meliputi mantan Plt Ketua DPW PAN Lampung sekaligus Komisaris PT Bumi Lampung Persada (Irfan Nuranda Jafar), Direktur PT Asmi Hidayat (Adi Gunawan), Komisaris PT Bumi Berkah Prioritas Cik Ali Salim, Direktur PT Desna Rapih Entis Sutisna dan Direktur PT Rudi Karya Langgeng Rudi Darianto.

Sedangkan empat saksi yang tidak hadir yakni Suhadi, Ikhsan Nurjanah, Bobby Zulhaidir, dan Hengki Widodo alias Engsit.

Dalam keterangannya, Irfan Nuranda membantah kalau sudah menghubungi sejumlah oknum agar terdakwa Hermansyah Hamidi tidak menjadi tersangka KPK. "Awalnya Hermansyah Hamidi datang ke rumah saya sekitar September 2020," katanya.

Kedatangan ini untuk meminta masukan dari saksi soal kondisi Hermansyah yang berpotensi menjadi tersangka. Saksi lalu

menghubungi Slamet dari Pekalongan dan Suhadi. "Keduanya menawarkan bisa membantu Hermansyah supaya tidak jadi tersangka KPK," ujarnya.

Irfan juga mengaku pernah bertemu dengan Agung yang masih ada hubungannya dengan Slamet. Di hadapan hakim, saksi lalu mengaku kalau upaya itu hanya akan sia-sia. "Saya lalu sadar kalau iri cuna menyusahkan," katanya.

Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho lalu bertanya kepada Irfan, benarkah Agung yang dimaksud adalah Oki Agung Prasetyono. Irfan menjawab, "Mungkin, informasinya orang BIN. Lalu bertemu juga sama Ikhsan Nurjanah," kata dia.

Irfan menuturkan awalnya para oknum ini meminta dana Rp3 miliar. Karena tidak sanggup lalu terus turun sampai di angka Rp1 miliar. "Kami tidak sanggup sebab permintaannya terlalu besar," ujarnya.

Selain itu, Irfan juga mengaku tidak mengetahui ketika perusahaannya mendapatkan tender proyek pekerjaan di Lamsel. Dia mengaku mengetahui ini saat di periksa KPK di Mako Brimob. (ABU/K2)